

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.Hamid S. Attamimi, P. K. (1990). *Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara*, Disertasi,. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Aminudin Ilmar, (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Bagir Manan,(1994).*Dasar-dasar konstitusional Peraturan Perundang- undangan Nasional*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Bambang Sutiyoso,(2010). *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta:UIN Press,2006)
- Bayu Dwi Anggono, *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, (Jakarta:Konpress;2020)
- Dominikus Rato, *filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Hotma P, Sibuea, (2010).*Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan, dan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- I gede Pantja Astawa, (2008).*Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan DI Indonesia*, Bandung:Alumni.
- Jazim Hamidi,(2011).*Hermeneutika Hukum, Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir*, Malang: UB Press.
- Jhony Ibrahim, (2011).*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang :Bayumedia.
- Maria Farida Indrati,(1998).*Ilmu perundang-undangan (Dasar-Dasar Pembentukannya)*, Yogyakarta : Kanisius.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008).*Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati,(2005).*Argumentasi Hukum: Langkah Langkah Legal Problem Solving dan Penyusunan Legal Opinion*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ridwan HR, (2014).*Diskresi Dan Tanggung Jawab Pemerintah*,Yogyakarta: FH UII Press
- Ridwan HR. (2014).*Hukum Administrasi Negara*,Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo dan Roni Hanintijo Soemitro,(1986) *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku

- Materi Pokok Modul; 1-5, Karunia, Jakarta Universitas Terbuka.
- Soerjono Soekanto,(1996), *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta:UI Press.
- Sudikno Mertokusumo,(1999).*Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono, (1994) *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir XX*, Bandung:Alumni.
- Yudi Setiawan, Boedi Djatmiko Hadiatmodjo, Imam Ropii, (2017). *Hukum Administrasi Pemerintahan*, Jakarta :Rajagrafindo.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Zainudin Ali, (2011).*Metode penelitian hukum cetakan ke-3*, Jakarta:Sinar Grafika.
- _____, (1987).*Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, cet-I, Surabaya: PT Bina Ilmu.
- _____, et. al, (2011).*Pengantar Hukum Administrasi Di Indonesia*, cet-11, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

B. Jurnal

- Attamimi, A. Hamid S., “*Hukum tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan)*”, Pidato Purna Bakti Guru Besar Tetap, diselenggarakan pada hari Senin tanggal 20 September 1993 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jan Michael Otto, Suzano Stoter, Julia Arnscheidt and Wim Oosterveld, *Legislative Theory to Improve Law Adna development Project*, dalam jurnal *Regel Mat* Vol.2004/4
- Marzuki, H.M. Laica, “*Kebijakan Yang Diperjanjikan “Beleids Overeenkomst”*. *Sarana Keperdataan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah*”, Makalah ini pernah Disajikan pada penataran hukum nasional hukum acara dan hukum administrasi negara, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 26-31 Agustus 1996 di Ujung Pandang.
- Nalle, Victor Imanuel W. “*kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan (kajian Putusan Nomor 23P/HUM/2009)*”, *Jurnal Yudisial*, Volume 6 Nomor 1 April 2013.

Permana, Tri Cahya Indra, *“Penguujian Keputusan Diskresi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara”*, Tesis di Universitas Diponegoro Semarang, 2009. Manan, Bagir, *“Peraturan Kebijakan”*, Makalah ini pernah disampaikan pada penataran dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, tanggal 5 April 1994.

Thoha, Miftah, *“Lembaga Birokrasi Dalam Negara”*, *Jurnal Prisma*, Vol 3, Nomor 2, LP3ES, 2014.

_____, *“Asas, Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan”*, Ceramah di Departemen Pertambangan dan Energi RI, Jakarta, 8 April 1994.

_____, *“Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”*, Makalah disampaikan Penataran Nasional Hukum Administrasi Negara, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Ujung Pandang, 31 Agustus 1996.

_____, *“Peraturan Kebijaksanaan (beleidsregel): Hakikat serta Fungsinya Selaku Sarana Hukum Pemerintahan”*, Makalah ini pernah disajikan pada penataran hukum nasional hukum acara dan hukum administrasi negara, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin 26-31 Agustus 1996 di Ujung Pandang.

_____, *fungsi dan Materi Peraturan Perundang-Undangan”*, Makalah ini pernah disajikan pada penataran Dosen Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum BKS-PTN bidang hukum di wilayah barat Fakultas Hukum Universitas Lampung, di Bandar Lampung.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 23P/HUM/2009 Tahun 2009 Tentang Uji Materiil Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Nomor 03E/31/DJB/2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara Sebelum Terbitnya Peraturan Pemerintah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat pertama dan terakhir perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil dalam *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan kawan-kawan v. Mahkamah Agung Republik Indonesia*, No. 27 P/HUM/2015.

D. Website

- "BAB II LANDASAN TEORI."
<https://anzdoc.com/download/bab-ii-landasan-teori7a2ecde0d71d8d383bb316db3b62c23e19397.html>. Accessed Agustus. 2019.
- "BAB II LANDASAN TEORITIS Bagian landasan teoritis ini"
https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/621bf8dc0782b97ac8e869bc1707b05f.pdf. Accessed Januari. 2021.
- "etika menjaga netralitas dan imparialitas bagi birokrasi dan."
<https://studylibid.com/doc/1239945/etika-menjaga-netralitas-dan-imparialitas-bagi-birokrasi....> Accessed 11 June. 2018.
- "HAK UJI MATERIIL - Jurnal Legislasi Indonesia."
<https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/276/163>. Accessed 11 June. 2019
- "JURNAL KOMUNIKASI HUKUM - Ejournal Undiksha - Universitas" 5 Feb. 2021,
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/31820/17515>. Accessed 10 June. 2021.
- "JURNAL KOMUNIKASI HUKUM - Ejournal Undiksha - Universitas" 5 Feb. 2021,
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/31820/17515>

7515. Accessed 10 June. 2021.

"KEBEBASAN BERTINDAK ADMINISTRASI NEGARA DALAM"

<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/download/1172/1001/>.

Accessed Juli 2018.

"KEDUDUKAN HUKUM PERATURAN/KEBIJAKAN-jdih@bappenas."

http://jdih.bappenas.go.id/data/monografifile/WORKSHOP_Peraturan

[_kebijakan_di_Kementerian_PPN_bappenas.pdf](#). Accessed 18 Juni. 2018.

"KEKUATAN HUKUM MENGIKAT SEMA NO. 7 TAHUN 2014"

https://123dok.com/document/zp148mvz-kekuatan-mengikat-tentang-pengajuan-permohonan-peninjauan-kembali_perkara.html. Accessed

Maret 2020.

"KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN"

<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/117/101>. Accessed 11 June. 2021.

"Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum...."

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/download/9573/4894>.

Accessed Agustus. 2019

"Peran PTUN dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang"

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=741159&val=11678&title=Peran%20%20PTUN%20dan%20%20AUPB%20%20Menuju%20Tata%20Kelola%20Pemerintahan%20yang%20Baik%20Good%20Governance>. Accessed 11 Juni 2019.

"Lex Administratum, Vol. VIII/No. 3/Jul-Sep /2020 80 AKIBAT HUKUM"

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/29755/28816>. Accessed Juli 2018.

<https://m.merdeka.com/peristiwa/tersangka-masuk-dpo-dilarang-ajukan-praperadilan.html>. diakses pada tanggal 26 April 2019

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20190425-125010-5297.pdf>.

Hukum Online, Kekuatan Produk-Produk Hukum MA, Perma, Sema, Fatwa,

SK KMA,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6102/kekuatan-hukum>

produk-produk-hukum-ma perma--sema--fatwa--sk-kma, diakses Hari
Selasa, Tanggal 5 juli 2020, Pukul 10.30.